

TRANSFORMASI PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK : PENDEKATAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Herianti¹, Wildayana², Ranti³, Kamiruddin⁴

Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3,4}

Email: ¹hesunherianti@gmail.com, ²wildayana595@gmail.com, ³ranti.rahim27@gmail.com,
⁴kamiruddinamin@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan sektor publik memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini membahas konsep dan pendekatan pembiayaan sektor publik dari perspektif konvensional dan syariah, termasuk sumber pendapatan, tantangan, serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Dalam pendekatan konvensional, pembiayaan sektor publik bertumpu pada pajak, pendapatan non-pajak, dan pinjaman. Sementara pendekatan syariah menekankan prinsip keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk. Tantangan utama dalam pembiayaan sektor publik di era modern meliputi keterbatasan pendapatan negara, pengeluaran yang tidak efisien, risiko utang, dan kebutuhan akan transparansi yang lebih baik. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya reformasi pengelolaan keuangan publik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Sektor Publik, Pembiayaan Konvensional dan Islam, Tantangan dan Implikasi

Abstract

Public sector financing plays a crucial role in supporting sustainable development and improving community welfare. This study discusses the concepts and approaches to public sector financing from conventional and sharia perspectives, including sources of income, challenges, and implications for public financial management in Indonesia. In the conventional approach, public sector financing relies on taxes, non-tax revenues and loans. Meanwhile, the sharia approach emphasizes the principles of justice, efficiency and benefit through instruments such as zakat, waqf and sukuk. The main challenges in public sector financing in the modern era include limited state revenues, inefficient spending, debt risks, and the need for greater transparency. This research underlines the importance of technology-based public financial management reform and community participation to achieve inclusive and sustainable development.

Keywords : Public Sector, Conventional and Islamic Financing, Challenges and Implications

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan sektor publik memiliki peranan krusial dalam mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia, penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menandai perubahan besar dalam tata kelola keuangan negara. Kedua undang-undang ini, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan memastikan keberhasilan pembangunan berbasis lokal¹.

Pembiayaan sector public tidak hanya bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung kemaslahatan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, pembiayaan public dipandang sebagai sarana untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang merata dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat.² Hal initercermin dalam konsep alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program- program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan publik, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam kontek sini, prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan landasan etis untuk memastikan bahwa Pembiayaan public dikelola dengan amanah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian ini, penting untuk memahami konsep sektor publik dan pembiayaan publik pemerintah dan peranannya, konsep pembiayaan sektor publik dalam konvensional maupun islam serta implikasi pembiayaan sektor publik dan kebijakan pengelolaan dan pengeluaran keuangan publik oleh Negara khususnya Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi konsep, tantangan, dan implikasi pembiayaan sektor publik. Sumber data dikumpulkan

¹ Eka Rahayu, 'Implikasi Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Kecamatan Rumbia)' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

² Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah (Kencana, 2016).

melalui: Studi Literatur: Mengkaji sumber-sumber literatur jurnal, buku, dan laporan resmi terkait pembiayaan sektor publik konvensional dan syariah. Analisis Kebijakan: Mengevaluasi kebijakan keuangan publik di Indonesia, termasuk pendekatan fiskal dan instrumen keuangan syariah yang diterapkan pemerintah. Studi Kasus: Menyoroti contoh-contoh implementasi kebijakan pembiayaan publik di berbagai daerah di Indonesia untuk memahami tantangan dan praktik terbaik. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif konvensional dan syariah dalam pengelolaan keuangan publik, dengan fokus pada aspek efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sektor Publik Dan Perannya Dalam Perekonomian

Sektor publik mencakup semua organisasi dan lembaga yang dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sektor publik berfungsi untuk menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, sektor ini juga berperan dalam pengaturan dan pengawasan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan.³ Sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh sektor swasta. Peran sektor publik dalam perekonomian mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi: Memastikan penyediaan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Fungsi distribusi: Mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan redistribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi: Menjaga keseimbangan ekonomi melalui intervensi fiskal dan moneter.⁴

Adapun peran sektor public dalam perekonomian meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan Barang dan Jasa: Sektor publik berperan dalam memproduksi

³Sayuti Sayuti, Jamaluddin Majid, and Muhammad Sapril Sardi Juardi, 'Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)', *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.1 (2018), pp. 16–28, doi:10.33096/atestasi.v1i1.39

⁴ Rahayu

- b. barang dan jasa yang penting untuk masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Ini termasuk pembelian barang dan jasa dari sektor swasta untuk disalurkan kepada masyarakat,
- c. Regulasi dan Pengaruh: Pemerintah memengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor swasta melalui kebijakan seperti subsidi, pajak, dan peraturan. Ini bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang diinginkan dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
- d. Redistribusi Pendapatan: Sektor publik juga berperan dalam redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini dilakukan melalui berbagai program sosial dan kebijakan fiskal.
- e. Penciptaan Kesempatan Kerja: Investasi pemerintah di sektor-sektor padat karya menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan dengan investasi di sektor padat modal. Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Stabilisasi Ekonomi: Sektor publik berfungsi untuk menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi atau situasi darurat.⁵

Dengan demikian sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengarahkan perekonomian untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

2. Pembiayaan Publik Pemerintah: Konvensional dan Islam

a. Pendekatan Konvensional

Konsep Utama Pembiayaan Sektor Pemerintah secara Konvensional, meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan layanan publik. Sistem ini berorientasi pada efektivitas ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut uraiannya:

a) Sumber Pembiayaan Pemerintah

⁵ Dr. Ridwan and Ihsan Suciawan Nawir, Buku Ekonomi Publik, ed. by Muhammad Fadhil Ridwan, Cetakan 1 (Pustaka Pelajar, 2021).

- 1) Pendapatan Pajak: Sumber utama pembiayaan pemerintah yang meliputi pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), bea cukai, dan pajak daerah, dikumpulkan dari masyarakat dan badan usaha untuk mendanai pengeluaran publik.
 - 2) Pendapatan Bukan Pajak (PNBP): Sumber lain yang berasal dari royalti sumber daya alam, keuntungan BUMN, denda administratif, dan hasil lain yang diterima pemerintah.
 - 3) Pinjaman Pemerintah: Penggunaan utang domestik dan internasional untuk menutupi defisit anggaran, dengan instrumen utama seperti obligasi negara yang diterbitkan di pasar keuangan.⁶
- b) Instrument Pembiayaan Konvensional
- 1) Obligasi dan Surat Utang: Pemerintah menerbitkan surat utang seperti obligasi negara untuk membiayai proyek infrastruktur dan menutupi defisit anggaran. Ini termasuk obligasi konvensional yang berbasis bunga.⁷
 - 2) Pinjaman Multilateral dan Bilateral: Pemerintah mendapatkan dana dari lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF, serta melalui perjanjian bilateral dengan negara lain.
 - 3) Privatisasi: Privatisasi aset negara atau penjualan saham perusahaan milik negara untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.
- c) Alokasi dan Pengelolaan Dana
- 1) Pengeluaran untuk Layanan Publik: Pembiayaan digunakan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan, dan subsidi.
 - 2) Investasi di Infrastruktur: Fokus pada proyek besar seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
 - 3) Pembayaran Utang: Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.⁸

b. Pendekatan Islam

⁶ Eithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

⁷Rahayu

⁸ Azizah Azis, 'Pengelolaan Sektor-Sektor Publik Ekonomi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17.2 (2019), pp. 639–52, doi:10.30863/ekspose.v17i2.120.

Pengelolaan pembiayaan sektor publik dalam perspektif syariah mencakup prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan masyarakat. Implikasi ini secara khusus mengatur bagaimana sumber daya keuangan dikumpulkan, dikelola, dan dialokasikan untuk kepentingan umum tanpa melanggar prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan rinci:

a) Prinsip Pengelolaan Berdasarkan Syariah

- 1) Keadilan Distribusi Kekayaan: Harta publik, seperti sumber daya alam, harus dikelola negara untuk kemaslahatan bersama, mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Misalnya, hasil tambang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat melalui pendapatan negara.
- 2) Pemanfaatan untuk Kemaslahatan: Kekayaan publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, sesuai dengan tujuan kemaslahatan dalam syariah.

b) Instrumen Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Sektor Publik

- 1) Zakat: Zakat menjadi sumber utama pembiayaan publik yang didistribusikan kepada kaum dhuafa dan kelompok yang membutuhkan, sesuai ketentuan syariah.
- 2) Wakaf: Wakaf digunakan untuk pembiayaan infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid. Wakaf produktif juga membantu meningkatkan pendapatan negara secara syariah.
- 3) Kharaj dan Jizyah: Pajak syariah seperti kharaj (pajak atas tanah) dan jizyah (pajak bagi non-Muslim) diterapkan dengan prinsip keadilan, tanpa memberatkan masyarakat, dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

c) Mekanisme Pengelolaan

- 1) Larangan Riba dan Praktik Haram; Pengelolaan sektor publik menghindari riba dan praktik ekonomi haram. Pendanaan dilakukan melalui instrumen syariah seperti sukuk (obligasi syariah).
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan anggaran publik menekankan amanah dan tanggung jawab, memastikan dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kemaslahatan masyarakat.⁹

3. Tantangan Utama dalam Pembiayaan Publik Pemerintah di Era Modern

⁹ Azis.

Pembiayaan sektor publik adalah aspek krusial pembangunan negara. Tantangan seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi cepat, dan perubahan iklim memperumit kebutuhan anggaran. Data BPS 2023 mencatat pertumbuhan populasi Indonesia sebesar 1,13% per tahun,¹⁰ yang menuntut pemerintah untuk meningkatkan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, di sisi lain, pendapatan negara tidak selalu sejalan dengan kebutuhan tersebut. Hal ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran publik.

Perkembangan teknologi meningkatkan tuntutan transparansi dalam keuangan publik. Transparency International (2022) mencatat indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 34/100, sementara data ICW menunjukkan kenaikan kasus korupsi, menyoroti tantangan integritas anggaran.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem pembiayaan sektor publik agar dapat memenuhi harapan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Di samping itu, tantangan global Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada pembiayaan sektor publik. Bank Dunia (2023) melaporkan penurunan pendapatan pajak di banyak negara, dengan 83% negara berpenghasilan rendah dan 48% berpenghasilan menengah ke bawah menghadapi keterbatasan anggaran. Di negara terdampak konflik, rasio pajak terhadap PDB rata-rata hanya 12,6% pada 2023.¹² Dalam konteks ini, pemerintah harus mencari solusi inovatif untuk meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan pengeluaran agar tetap dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu akan dibahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembiayaan sektor publik, termasuk aspek pendapatan, pengeluaran, dan manajemen anggaran. Berikut beberapa contoh kasus yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan ini.

a. Tantangan Pendapatan Negara

¹⁰ Badan Pusat Statistik, 'Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2023', BPS.Go.Id, 2024 <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi--2023.html?year=2023>> [accessed 22 November 2024]

¹¹ Aksi Informasi, 'Mengenal Indeks Persepsi Korupsi Dan Langkah Menaikkan Skornya', Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2024 <<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240813-mengenal-indeks-persepsi-korupsi-dan-langkah-menaikkan-skornya>> [accessed 22 November 2024]

¹² World Bank, 'Taxes & Government Revenue', World Bank Group, 2023 <<https://www.worldbank.org/en/topic/taxes-and-government-revenue>> [accessed 22 November 2024].

Pendapatan negara dari pajak dan non-pajak kerap tidak mencukupi kebutuhan anggaran. Bank Dunia (2022) mencatat rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia hanya 10,41%, di bawah rata-rata ASEAN, menunjukkan potensi pajak yang belum optimal. Tantangan lain meliputi struktur pajak yang belum mencakup sektor digital dan informal, ketergantungan pada komoditas seperti migas, serta kebocoran dalam sistem perpajakan. Reformasi pajak, diversifikasi pendapatan, dan penerapan teknologi seperti e-filing diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pendapatan negara.

b. Tantangan Pengeluaran Negara

Pengeluaran pemerintah terus meningkat, terutama untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, seringkali melampaui pertumbuhan pendapatan. Kementerian Kesehatan (2022) melaporkan anggaran kesehatan 2024 naik menjadi 5,6% dari APBN, meningkat 8,1% dibandingkan 2023, terutama akibat pandemi COVID-19.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor-sektor yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu peningkatan pengeluaran sering tidak disertai efisiensi. Data BPKP menunjukkan 30% pengeluaran negara terbuang akibat korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, yang mengurangi kepercayaan publik. Defisit anggaran Indonesia mencapai 4,5% dari PDB pada 2021, angka tertinggi dalam satu dekade, memaksa pemerintah berutang dan menambah beban negara.

Selain itu, alokasi anggaran sering tidak merata, dengan daerah terpencil menerima porsi lebih kecil dibandingkan perkotaan. Laporan UNICEF mencatat akses terbatas terhadap layanan dasar di wilayah terpencil, memperbesar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam anggaran sangat penting untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

c. Tantangan Manajemen Anggaran

Manajemen anggaran yang efisien memastikan sumber daya digunakan optimal. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek infrastruktur meski anggaran besar telah dialokasikan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan

¹³ Rokom, 'Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% Dari APBN, Naik 8.1% Dibanding 2023', Kemkes, 2023 <<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230816/0643661/anggaran-kesehatan-2024-ditetapkan-sebesar-5-6-dari-apbn-naik-8-1-dibanding-2023/>> [accessed 22 November 2024]

anggaran juga masih terbatas. Bank Dunia (2022) menyebut penerapan teknologi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi korupsi.

Partisipasi masyarakat, seperti melalui musrenbang, penting untuk memastikan anggaran sesuai kebutuhan publik. Meski beberapa daerah telah menerapkannya, banyak yang belum maksimal. Reformasi manajemen anggaran, perencanaan yang matang, penggunaan teknologi, dan keterlibatan masyarakat adalah kunci keberlanjutan pembiayaan sektor publik.

4. Implikasi Pembiayaan Sektor Publik dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia

Implikasi dari pembiayaan sektor publik dan kebijakan pengelolaan keuangan publik di Indonesia tampak pada beberapa aspek penting:

a. Stabilitas Ekonomi

Pengelolaan keuangan publik yang baik mendukung stabilitas ekonomi, mengurangi inflasi, dan menjaga nilai tukar. Pengeluaran publik, terutama di sektor infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Data BPS (2023) menunjukkan kontribusi infrastruktur terhadap PDB mencapai 10% pada 2022, menegaskan dampak signifikan investasi ini.¹⁴ Namun, dampak positif belum merata, dengan kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal tetap menjadi tantangan. Data Kementerian Desa (2023) menunjukkan perbedaan signifikan dalam akses layanan publik antara perkotaan dan pedesaan, menegaskan perlunya kebijakan anggaran yang lebih inklusif.¹⁵

Pembiayaan publik yang efektif meningkatkan kualitas hidup, seperti melalui bantuan sosial yang menurunkan angka kemiskinan dari 9,22% (2020) menjadi 8,39% (2022) (World Bank, 2023). Namun, kurangnya koordinasi dan data akurat sering menyebabkan program tidak tepat sasaran (LPPM, 2022).

Dari sisi lingkungan, anggaran harus mendukung keberlanjutan, termasuk investasi energi terbarukan dan perlindungan lingkungan. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 (KLHK, 2023), menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan publik yang berorientasi lingkungan.¹⁶

¹⁴ Yuniar Sri Hartati, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12.1 (2021), pp. 79–92, doi:10.55049/jeb.v12i1.74.

¹⁵ Fajri Maulana, Mala Sondang Silitonga, and Asropi, 'Intervensi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa', *Journal Publicuho*, 6.4 (2023), pp. 1393–1410, doi:10.35817/publicuho.v6i4.281

¹⁶ Ulfa Anggraini, Suparna Wijaya, and Saiful Lathif, 'Tinjauan Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia', *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3.1 (2023),

b. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia didorong oleh pembiayaan publik yang efektif. Sistem akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik, seperti diatur dalam PP No. 60/2008, dan penggunaan e-government seperti SIKP telah meningkatkan transparansi dan akses informasi publik terkait penggunaan anggaran. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.¹⁷

Meskipun terdapat upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan publik, tantangan masih signifikan. Korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa (KPK, 2022), menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, perlu penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat (UU No. 25/2004). Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga krusial (BKN, 2023). Singkatnya, perbaikan pengelolaan keuangan publik memerlukan kombinasi antara kebijakan yang baik, penegakan hukum yang tegas, partisipasi masyarakat yang aktif, dan sumber daya manusia yang kompeten.

c. Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial

Dengan alokasi yang proporsional untuk program-program sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembiayaan sektor publik dan kebijakan pengelolaan keuangan publik di Indonesia memberikan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Implikasi ini terlihat dalam beberapa aspek penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Program Perlindungan Sosial: Bantuan langsung tunai: Program seperti BST dan BLT-DD memberikan bantuan finansial langsung kepada masyarakat miskin, terutama saat krisis. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Memastikan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin.
- 2) Pemberdayaan UMKM: Pelatihan dan pendampingan: Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Akses kredit: Program KUR dan lainnya memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM.
- 3) Pembangunan Infrastruktur: Penciptaan lapangan kerja: Investasi infrastruktur membuka peluang kerja baru. Peningkatan akses: Mempermudah akses masyarakat miskin terhadap fasilitas publik.

- 4) Sektor Pendidikan: Alokasi anggaran 20%: Menjamin akses pendidikan yang lebih baik bagi semua. Peningkatan kualitas SDM: Investasi dalam pendidikan sebagai modal pembangunan jangka panjang.
- 5) Sektor Kesehatan: Peningkatan fasilitas kesehatan: Menjamin akses layanan kesehatan dasar, terutama di daerah terpencil.

d. Resiko Utang

Ketergantungan Indonesia pada utang untuk membiayai sektor publik membawa risiko fiskal yang signifikan. Utang yang berlebihan dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam membayar bunga dan membiayai program-program penting lainnya. Risiko likuiditas, yaitu kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu, juga menjadi ancaman. Meskipun Fitch Ratings (2023) memberikan peringkat utang Indonesia yang stabil, potensi peningkatan utang yang tidak terkendali dapat menurunkan peringkat tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan utang yang hati-hati menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan keberlanjutan fiskal negara.¹⁸

Pemerintah menghadapi implikasi serius terkait pembiayaan sektor publik dan pengelolaan utang, di mana alokasi anggaran yang besar untuk membayar utang dapat menghambat investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi (Rajan & Subramanian, 2011). Selain itu, pemangkasan anggaran untuk program sosial akibat tingginya beban utang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19, di mana 60% responden merasa khawatir dengan kondisi ekonomi pasca-pandemi (LSI, 2022). Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengembangkan strategi mitigasi yang efektif, seperti menerbitkan obligasi dengan suku bunga tetap dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan utang untuk membangun kepercayaan masyarakat (World Bank, 2021). Sebagaimana dinyatakan oleh Bank Indonesia (2023), pengelolaan risiko suku bunga juga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan publik.

e. Keterlibatan Masyarakat

Transparansi dalam anggaran dan pengelolaan keuangan publik mendorong partisipasi masyarakat, memungkinkan mereka terlibat dalam perencanaan anggaran, pengawasan penggunaan anggaran, dan evaluasi program. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

¹⁸ 20Tim IIGF, 'Kompodium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur', 2023, 1–23

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, di lapangan, partisipasi ini masih terbatas, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.¹⁹

Dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang diluncurkan pada tahun 2007, menunjukkan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan dana dan proyek pembangunan, dengan lebih dari 60% penerima manfaat berasal dari keluarga miskin (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2017). Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses keuangan publik dan kapasitas untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif diperlukan, dengan peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun telah ada kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat tidak tahu cara mengakses informasi anggaran daerah (Ombudsman RI, 2024). Keterlibatan masyarakat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka.²⁰

Contoh implementasi yang baik dalam pengelolaan keuangan publik adalah Program Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), yang diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya. Program ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik meningkat sebesar 20% dalam dua tahun terakhir (Pemerintah Kota Surabaya, 2023).²¹

Meskipun terdapat contoh positif seperti Program Anggaran Berbasis Kinerja, banyak daerah di Indonesia yang belum menerapkan kebijakan ini secara efektif, dengan hanya 30% dari anggaran daerah yang digunakan untuk program berdampak langsung pada masyarakat (Kementerian Keuangan, 2022). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran juga menjadi tantangan karena banyak yang merasa tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya.

¹⁹ Undang-Undang Nomor, 'Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional', 25AD.

²⁰ 22Renata Christian Adiguna, Komang Adi Sastra Wijaya, and Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, 'Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dari Sudut Pandang Ketepatan Waktu Dan Kecermatan Pelayanan', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2.1 (2024), pp. 14–19, doi:10.61292/eljbn.150

²¹ 23Iwan Henriyadi Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, *Teori Administrasi Publik Pengantar, Administrasi Negara Publik*, 2023.

Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting, seperti inisiatif “Citizen Report Card” yang berhasil di beberapa kota (World Bank, 2019). Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, proses pengelolaan anggaran dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

f. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi

Kebijakan pengelolaan keuangan publik di Indonesia harus mematuhi hukum dan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, dengan total anggaran negara untuk tahun 2023 mencapai Rp 3.106 triliun yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Kementerian Keuangan, 2023). Namun, tantangan dalam transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran masih ada. Penelitian World Bank menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran publik di sektor infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional, seperti yang terlihat pada proyek jalan tol Trans-Jawa (World Bank, 2022). Selain itu, laporan BPK menunjukkan bahwa kurangnya alokasi anggaran yang tepat menghambat kualitas pelayanan publik di beberapa daerah (BPK, 2022). Mengingat Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, penting untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam pola pembiayaan publik (UNDP, 2023²²

Dengan demikian, pengelolaan keuangan publik di Indonesia, dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 3.106 triliun, memerlukan kepatuhan pada hukum untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Meskipun peningkatan pengeluaran publik di sektor infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, tantangan dalam transparansi, akuntabilitas, dan alokasi anggaran yang tepat masih ada, yang berdampak pada kualitas layanan publik. Penting untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam pembiayaan publik, terutama mengingat kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim.

D. KESIMPULAN

Transformasi Pembiayaan Sektor Publik" menunjukkan bahwa pembiayaan sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan konvensional dalam pembiayaan sektor publik berfokus pada pengumpulan pendapatan dari pajak, pendapatan non-pajak, dan pinjaman, sementara pendekatan syariah menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk.

²² TJANDRA, W. Riawan; SH, M. Hukum keuangan negara. Grasindo, 2006.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan sektor publik cukup signifikan, termasuk keterbatasan pendapatan negara, pengeluaran yang tidak efisien, dan kebutuhan akan transparansi yang lebih baik. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak merata dan dampak dari kondisi global seperti pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi.

Meskipun telah diuraikan berbagai solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan sektor publik, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan dan kedalaman analisis, masih banyak aspek yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, termasuk studi kasus yang lebih mendalam dan analisis data yang lebih komprehensif. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan sektor publik terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berubah. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan publik di Indonesia, serta penting untuk diakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu digaris bawahi bahwa kesempurnaan dan kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi Informasi, 'Mengenal Indeks Persepsi Korupsi Dan Langkah Menaikkan Skornya', Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2024 <<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240813-mengenal-indeks-persepsi-korupsi-dan-langkah-menaikkan-skornya>> [accessed 22 November 2024]
- Azizah Azis, 'Pengelolaan Sektor-Sektor Publik Ekonomi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17.2 (2019), pp. 639–52, doi:10.30863/ekspose.v17i2.120.
- Badan Pusat Statistik, 'Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2023', BPS.Go.Id, 2024<<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi--2023.html?year=2023>> [accessed 22 November 2024]

- Dr. Ridwan and Ihsan Suciawan Nawir, *Buku Ekonomi Publik*, ed. by Muhammad Fadhil Ridwan, Cetakan 1 (Pustaka Pelajar, 2021).
- Eithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Eka Rahayu, 'Implikasi Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Kecamatan Rumbia)' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).
- Fajri Maulana, Mala Sondang Silitonga, and Asropi, 'Intervensi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa', *Journal Publicuho*, 6.4 (2023), pp. 1393–1410, doi:10.35817/publicuho.v6i4.281
- Iwan Henriyadi Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, *Teori Administrasi Publik Pengantar, Administrasi Negara Publik*, 2023.
- Kemkes, 2023 <<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230816/0643661/anggaran-kesehatan-2024-ditetapkan-sebesar-5-6-dari-apbn-naik-8-1-dibanding-2023/>> [accessed 22 November 2024]
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Kencana, 2016). pp. 72–92, doi:10.54957/jolas.v3i1.411
- Pusat Analisis Anggaran and others, 'MENTERI KEUANGAN NOMOR', 2023
- Renata Christian Adiguna, Komang Adi Sastra Wijaya, and Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, 'Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dari Sudut Pandang Ketepatan Waktu Dan Kecermatan Pelayanan', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2.1 (2024), pp. 14–19, doi:10.61292/eljbn.150
- Rokom, 'Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% Dari APBN, Naik 8.1%
- Sayuti Sayuti, Jamaluddin Majid, and Muhammad Sapril Sardi Juardi, 'Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)', *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.1 (2018), pp. 16–28, doi:10.33096/atestasi.v1i1.39
- Tim IIGF, 'Kompodium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur', 2023, 1–23
- TJANDRA, W. Riawan; SH, M. *Hukum keuangan negara*. Grasindo, 2006.

- Ulfa Anggraini, Suparna Wijaya, and Saiful Lathif, 'Tinjauan Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia', *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3.1 (2023), Undang-Undang Nomor, 'Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional', 25AD.
- World Bank, 'Taxes & Government Revenue', World Bank Group, 2023 <<https://www.worldbank.org/en/topic/taxes-and-government-revenue>> [accessed 22 November 2024].
- Yuniar Sri Hartati, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12.1 (2021), pp. 79–92, doi:10.55049/jeb.v12i1.74.